

***THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL REVENUES, GENERAL ALLOCATION FUND, AND SPECIAL ALLOCATION FUND ON CAPITAL EXPENDITURE***  
***(CASE STUDY IN REGIONAL/CITY OF PROVINCE PAPUA PERIOD 2017-2022)***

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA TAHUN 2017-2022)**

**Putri Handayani<sup>1</sup>, Raden Budi Hendaris<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jenderal Achmad Yani

[putrihandayani\\_20p030@ak.unjani.ac.id](mailto:putrihandayani_20p030@ak.unjani.ac.id)<sup>1</sup>, [budihendaris@gmail.com](mailto:budihendaris@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of the study is to ascertain how capital expenditures for the Papua province are impacted by regional original revenues, general allocation funds, and special allocation funds of partial and simultaneous equity. The APBD Budget Realization Report of the Government of Regional/Cities in Papua Province, which covers a period of 6 years beginning in 2017 and ending in 2022, is the population of the study. There are 29 regional/cities in the province, and 174 people make up the sample. Secondary data from the APBD Realization Report, acquired from DJPK Kemenkeu RI, is the type of data that was used. Double linear regression is used in data analysis techniques along with documentation and library resources. The study's findings indicated that the regional original revenues variable, the general allocation fund, and the special allocation fund all had no effect on capital expenditures in the regional or city of Papua. At the same time, the regional original revenues, the special allocation fund, and the general allocation fund all had no effect on capital expenditures in the regional or city of Papua.*

**Keywords:** *Regional Original Revenues, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara parsial dan bersamaan mempengaruhi belanja modal di pemerintahan provinsi papua. Penelitian ini berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, yang berlangsung selama 6 tahun, mulai dari tahun 2017–2022. Penelitian ini mencakup 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dan sampel yang digunakan adalah 174 individu. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder, yaitu Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari DJPK Kemenkeu RI. Metode pengumpulan data dilengkapi dengan petunjuk dan literatur, selain analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memengaruhi belanja modal; dana alokasi umum dan khusus tidak memengaruhi belanja modal; dan, pada saat yang sama, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus tidak memengaruhi belanja modal Kabupaten atau Kota Provinsi Papua.

**Kata kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.

**PENDAHULUAN**

Pembangunan wilayah adalah bagian integral dari ekspansi atau pembangunan

nasional, yang dilakukan atas dasar otonomi daerah dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kerakyatan dan kualitas suatu wilayah melalui aturan sumber daya nasional. Tujuan pembangunan wilayah ini adalah untuk menjadi aktif, terpadu, dan meningkatkan keinginan dan ketenteraman masyarakat. Pemerintahan daerah adalah bagian dari pemerintahan pusat yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pemerintahan dan bantuan terhadap rakyat, serta meningkatkan keinginan rakyat untuk pelayanan masyarakat yang hemat, baik, benar, terbuka, bertanggung jawab, dan peduli di masa perubahan (Inman, 2011).

Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memungkinkan daerah untuk menerapkan otonomi daerah, yang secara resmi dimulai pada 1 Januari 2001. Setiap daerah memiliki otoritas untuk mengelola perekonomian dan memaksimalkan sumber dayanya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa mereka mampu melaksanakan wewenang mereka dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka.

Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah pada kewenangan publik. Undang-undang ini menetapkan bahwa pemerintah daerah harus mengatasi semua kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan, penyediaan fasilitas, dan pembangunan infrastruktur, yang

merupakan tanggung jawab setiap pemerintah daerah (Putri et al., 2021).

Hal utama yang menentukan bagaimana daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada adalah anggaran, yang biasanya disebut sebagai APBD, atau pendapatan daerah dan anggaran belanja. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya keuangan mereka sendiri (Ananda & Habiburrahman, 2023).

Di Indonesia, banyak wilayah masih jauh dari kemajuan ekonomi, teknologi, dan pembangunan. Provinsi Papua adalah salah satu yang paling tertinggal, dengan 4.970 desa (974 tertinggal dan 3.996 sangat tertinggal) menurut data BPS tahun 2021. Walaupun demikian, angka ini menurun jika dibandingkan dengan data dari tahun 2020, yang menunjukkan 5.015 desa tertinggal. Hal ini dapat disebabkan oleh pendidikan dan pembangunan yang tidak merata, serta kualitas tenaga kerja yang rendah. Warga Papua sangat kecewa karena pembangunan infrastruktur dasar lambat. Namun, tidak sedikit anggaran dari pemerintah pusat yang dialokasikan melalui APBD untuk kegiatan pemerintah provinsi. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta sumber lain dari pendapatan yang sah, menyediakan dana untuk kegiatan tersebut (Koranjakarta, 2021).

Berdasarkan Laporan kajian fiskal regional Provinsi Papua tahun 2021 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Dari sisi realisasi, APBD Provinsi Papua tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup tajam pada pendapatan daerah sebesar 33,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp43,38 triliun menjadi Rp28,78 triliun. Demikian juga dengan belanja daerah mengalami penurunan realisasi sebesar 3,65 persen dari Rp42,13 triliun di tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp40,63 triliun. Disamping penurunan pada belanja daerah, persentase belanja modal meningkat 1% atas belanja daerah dibandingkan dengan tahun 2020.

Dalam situasi di mana PAD dan dana perimbangan digunakan dalam hubungannya dengan belanja modal, tujuan dari pengeluaran belanja modal adalah untuk mendapatkan aset yang memiliki kemampuan untuk membangun fasilitas publik. Provinsi Papua menerima sejumlah besar dana perimbangan dari pemerintah pusat; TKD dari pemerintah pusat menjadi sumber terbesar yang digunakan provinsi untuk membayar daerah. Pemerintah Provinsi Papua belum memanfaatkan secara efektif potensi pendapatan dari daerahnya sendiri. Akibatnya, ini bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan, mendukung infrastruktur, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan daerah dan realisasi total belanja daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal”**. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dengan belanja modal dan memberikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan data penelitian yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini metode kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan kausal digunakan untuk

menguji lebih lanjut mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal dengan pengujian suatu hipotesis untuk menentukan apakah diterima atau ditolak.

Metode penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2019b) menyatakan pengertian dari penelitian deskriptif adalah:

“Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain.”

Sedangkan pengertian metode kausal menurut (Sugiyono, 2019) adalah :

“Hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang memengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Kriteria yang diambil yaitu jika t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yang artinya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan jika t hitung < t tabel dan tingkat signifikansi > 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil uji statistik t (secara parsial):

**Tabel 1.** Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,835	,677		2,710	,007
Pendapatan Asli Daerah	,002	,017	,002	,129	,898
Dana Alokasi Umum	-,011	,049	-,018	-,234	,815
Dana Alokasi Khusus	,074	,108	,053	,683	,495

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Output SPSS 25 (Data Olahan, 2024)

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa t tabel dengan rumus  $(a/2 ; n-k-1)$ , yang mana diperoleh nilai sebesar 1,940 dengan derajat kebebasan  $df=n-k-1$ , dimana nilai  $n$ =jumlah data dan  $k$ =jumlah variabel independe, maka  $df=174-3-1=170$ , maka yang diperoleh t tabel adalah 1,940. Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan nilai t hitung  $0,129 < 1,940$  dan nilai signifikansi  $0,898 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
- Variabel Dana Alokasi Umum (X2) dengan nilai t hitung  $-0,234 < 1,940$  dan nilai signifikansi  $0,815 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
- Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) dengan nilai t hitung  $0,683 < 1,940$  dan nilai signifikansi  $0,495 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## 2. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)

Uji f bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan antara f hitung dengan f tabel menggunakan daftar tabel distribusi F. Kriteria yang dapat diambil adalah jika f hitung  $>$  f tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, namun jika f hitung  $<$  f tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil dari uji statistik f (secara simultan):

**Tabel 2.** Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41,609	3	13,870	,381	,767 <sup>b</sup>
	Residual	6184,543	170	36,380		
	Total	6226,152	173			

a. Dependent Variable: Y-BM  
b. Predictors: (Constant), X3-DAK, X2-DAU, X1-PAD

Sumber: Hasil Output SPSS 25 (Data Olahan, 2024)

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa f tabel dengan rumus  $(k ; n-k)$  yang mana diperoleh nilai sebesar 2,66 , dimana  $k$ =jumlah variabel independen dan  $n$ =jumlahdata. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai f hitung untuk seluruh variabel independen sebesar  $0,381 < 2,66$  dapat dijelaskan bahwa f hitung lebih kecil dari f tabel dan nilai signifikansi  $0,767 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

## Pembahasan Hasil

### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan secara parsial untuk pemerintah daerah kabupaten dan kotadi

provinsi papua yang menjadi sampel penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh karena nilai  $t$  hitung  $0,129 < 1,940$  dan nilai signifikansi  $0,898 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pendapatan asli daerah dalam meningkatkan belanja modal pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi papua belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pendapatan Asli Daerah lebih diutamakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi. Persentase PAD dari total pendapatan daerah masih sangat rendah, sehingga PAD belum dapat dioptimalkan untuk dialokasikan pada belanja modal.

Berdasarkan teori *stewardship* pemerintah harus menjadi pengelola yang baik bagi seluruh pendapatan yang dimiliki daerah, dan harus bertindak bertanggungjawab, tidak mementingkan kepentingan pribadi guna memaksimalkan pendapatan yang dimiliki oleh organisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang dimiliki harus dapat dikelola dan dimanfaatkan agar dapat memaksimalkan dalam belanja modal dan memberi manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu oleh (Maryati et al., 2022), dan (Hilda Dyah Safitri & Kiky Asmara, 2023) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yaitu (Muttaqin et al., 2021), (Surakhman et al., 2019), dan (Romadhon & Aji, 2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal yang berarti jika total pendapatan asli daerah yang dimiliki

suatu daerah besar, maka pemanfaatan pendapatan asli daerah yang dimiliki akan lebih optimal untuk meningkatkan belanja modal. Pemerintah diharapkan dalam menggali potensi pendapatan asli daerah untuk meningkatkan belanja modal pemerintah daerah menjadi lebih baik dengan mengoptimalkan potensi meningkatnya pendapatan asli daerah.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan secara parsial untuk pemerintah kabupaten dan kota provinsi papua yang menjadi sampel penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena nilai  $t$  hitung  $-0,234 < 1,940$  dan nilai signifikansi  $0,815 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum yang tinggi belum optimal dialokasikan kepada belanja modal guna perolehan aset tetap dan aset lainnya, dana alokasi umum lebih banyak dialokasikan untuk pembiayaan prioritas untuk program kegiatan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana alokasi umum yang belum merata untuk belanja yang harus dikeluarkan oleh daerah.

Berdasarkan teori *stewardship* pemerintah daerah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal*, dana alokasi umum yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus digunakan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat melalui perekonomian maupun peningkatan pada pelayanan publik, dan pemerintah sebagai *steward* juga harus melaporkan bahwa dana alokasi umum

sudah diterima dengan baik dan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga hal itu bisa berguna untuk meningkatkan perolehan aset daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hilda Dyah Safitri & Kiky Asmara, 2023) dan (Alhogbi et al., 2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lutpikah & Mahendra, 2020) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Semakin besar dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya melalui belanja modal. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari dana alokasi umum sehingga hal ini memotivasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan belanja modal untuk memperoleh aset daerah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### **3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan secara parsial untuk pemerintah kabupaten dan kota provinsi papua yang menjadi sampel penelitian ini diperoleh hasil analisis bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena nilai  $t$  hitung  $0,683 < 1,940$  dan nilai signifikansi  $0,495 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi papua menunjukkan bahwa kontribusi dana alokasi khusus terhadap belanja modal masih rendah. Hal ini berkaitan dengan prioritas dari pengalokasian dana alokasi khusus ini untuk pembangunan sarana dan prasarana

untuk pembangunan daerah. Baik pembangunan fisik maupun non fisik seperti fasilitas umum maupun untuk membiayai program penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi pemerintah juga perlu mengalokasikan dana alokasi umum untuk belanja modal guna menambah aset daerah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan teori *stewardship*, dimana pemerintah bertindak sebagai *steward* bertindak rasional dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Dana alokasi khusus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan kota provinsi papua.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu (Maryati et al., 2022) dan (Huda & Sumiati, 2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu oleh (Surakhman et al., 2019) dan (Dewi, 2019) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan meningkatnya dana alokasi khusus, belanja modal juga akan meningkat secara proporsional. Dampak positif dana alokasi khusus terhadap belanja modal adalah menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab dan berupaya sebaik-baiknya dana alokasi khusus sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah.

### **Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi papua tahun 2017-2022. Peneliti memiliki keterbatasan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan dalam tahun penelitian, dimana pada penelitian ini penulis hanya

- melakukan pengamatan dalam kurun waktu 5 tahun penelitian yaitu dari 2017-2022.
2. Keterbatasan mengenai jumlah variabel yang diteliti, dimana pada penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan satu variabel dependen yaitu Belanja Modal.
  3. Keterbatasan pada objek penelitian, dimana pada penelitian ini penulis hanya menggunakan pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi papua tahun 2017-2022.
  4. Masih ada banyak variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi variabel dependen yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Peneliti memiliki keterbatasan dalam menganalisis dan mengolah data sampel untuk variabel penelitian, yang dapat menyebabkan kesalahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana lokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota provinsi papua periode 2017-2022 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi Belanja Modal pada kabupaten/kota provinsi papua tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kenaikan dan penurunan tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang masih kurang baik dalam upaya penyaluran dana dari APBD untuk pembangunan daerah melalui Belanja Modal.
2. Kondisi Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota provinsi papua tahun 2017-2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup baik meskipun terdapat penurunan 2%

pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada di daerahnya sendiri.

3. Kondisi Dana Alokasi Umum pada kabupaten/kota provinsi papua tahun 2017-2022 secara keseluruhan menunjukkan tren yang positif dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Alokasi Umum selama enam tahun, meski terdapat penurunan pada tahun 2018 dan 2020. Penurunan ini mungkin terjadi akibat dampak dari perubahan kebijakan atau efek dari pandemi.
4. Kondisi Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota provinsi papua tahun 2017-2022 secara keseluruhan masih kurang baik karena persentase yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana dana alokasi khusus ini seharusnya dapat dioptimalkan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana di kabupaten/kota provinsi papua.
5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota provinsi papua tahun 2017-2022 sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
  - b. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
  - c. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.
  - d. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul, H. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. <http://scholar.unand.ac.id/35992/4/>
- [2] Ahyar, H., Auliya, N. ., Andriani, H., Fardani, R. ., Uswaty, J., & Utami, F. . (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- [3] Alhogbi, B. G., Arbogast, M., Labrecque,

- M. F., Pulcini, E., Santos, M., Gurgel, H., Laques, A., Silveira, B. D., De Siqueira, R. V., Simenel, R., Michon, G., Auclair, L., Thomas, Y. Y., Romagny, B., Guyon, M., Sante, E. T., Merle, I., Duault-Atlani, L., Anthropologie, U. N. E., ... Du, Q. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota/Kabupaten Jawa Timur Tahun 2018. *Gender and Development*, 120(1), 0–22. [http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1.\\_ahmed-affective\\_economies\\_0.pdf%0Ahttp://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html%0Ahttp://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID\\_ARTICLE=CE\\_A\\_202\\_0563%5Cnhttp://www.cairn.info](http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1._ahmed-affective_economies_0.pdf%0Ahttp://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html%0Ahttp://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CE_A_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.info).
- [4] Ananda, F., & Habiburrahman. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), 7437–7448.
- [5] Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. <http://eprints.polsri.ac.id/10613/7/>
- [6] Baldric, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). UPP STIM YKPN. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1960/12/UNIKOM\\_Estin\\_Wahyuni\\_17](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1960/12/UNIKOM_Estin_Wahyuni_17)
- [7] Basuki, A. T. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Rajawali Pers.
- [8] Dewi, E. P. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kab/Kota Sumatera Barat. *Journal of Economic*, 01(04), 1–19.
- [9] Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>
- [10] Fahmi, M., & Hairani. (2019). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v16i1.3407>
- [11] Ghazali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9 ed.). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- [12] Gunawan, C. (2020). *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*. CV Budi Utama.
- [13] Hilda Dyah Safitri, & Kiky Asmara. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Kota Cirebon Tahun 2012-2021. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1753–1760. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1418>
- [14] Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>
- [15] James, H. D., D. David, S., & Lex, D. (n.d.). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management*, 22, 22–47.
- [16] Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- [17] Maryati, M., Wahdi, N. S., & Santoso, A. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah Terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten se Jawa Tengah. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*,

- 3(2), 125–133.  
<https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1677>
- [18] Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 362–371.  
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15390>
- [19] Megasari, I. A. G. . (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 2. [https://repository.binadarma.ac.id/1985/3/Rahmawati Gita Muslimah](https://repository.binadarma.ac.id/1985/3/Rahmawati%20Gita%20Muslimah)
- [20] Mustiani, I., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 403–418.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.2020>
- [21] Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28.  
<https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- [22] Ndadari, L. W., & Priyo Hari, A. (2008). *Perilaku Simetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat*. The 2nd National Conference UKWMS.
- [23] Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja modal. *Inovasi*, 17(4), 653–660.  
<https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10041>
- [24] Rivianto, A., Agustin, H., Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., & Akuntansi Fakultas Ekonomi, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17.  
<http://jea.pppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>
- [25] Romadhon, S. W., & Aji, T. S. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Independent: Journal of Economics*, 1(2), 41–55.  
<https://doi.org/10.26740/independent.v1n2.p41-55>
- [26] Sarwono, J. (2015). *Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi*. ANDI.
- [27] Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revi). Rajawali Pers. <http://scholar.unand.ac.id/27456/4/4->
- [28] Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Ayu Sofiati, N. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Andi.
- [29] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- [30] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [31] Sularso, H., Restiani, Y. ., & Istiqomah, A. . (2014). Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi pada Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah). *SNA 17 Mataran Lombok*.
- [32] Suparto. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–24, 10.
- [33] Surakhman, A., Djazuli, A., & Choiriyah. (2019). Pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. *Kolegial*, 7(2), 161–164.
- [34] Undang-Undang RI. (2004). *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (UU Nomor 33 Tahun 2004)*.

- [35] Undang-Undang RI. (2009). *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009)*.
- [36] Undang-Undang RI (2014). *tentang Pemerintah Daerah (UU Nomor 23 tahun 2014)*.
- [37] Undang-Undang RI. (2022) *tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. UU Nomor 1 Tahun 2022*.